

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat pada tahun 2020 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan,

- ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang perumahan maupun kawasan permukiman diantaranya terdapatnya kawasan rawah kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian, terdapat rumah tidak layak huni, terbatasnya

penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak serta sasaran yang hendak dicapai yakni meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat tersebut maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2020, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Tahun 2020 dari 2 sasaran, pertama meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan permukiman rawan kumuh dari target 0,62 % terealisasi 0,44 % (capaian 129,03 %). Kedua meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dari target 77,2 % terealisasi 78,48 % (capaian 101,66%).

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2020 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala /

hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	6
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu – Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja	14
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2019	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2019	19
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	19
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	21
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	22
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	22
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	22
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
C. Prestasi / Penghargaan	25
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Langkah Perbaikan	27

Lampiran – Lampiran :

- A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja

sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan dan evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Dinas Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan

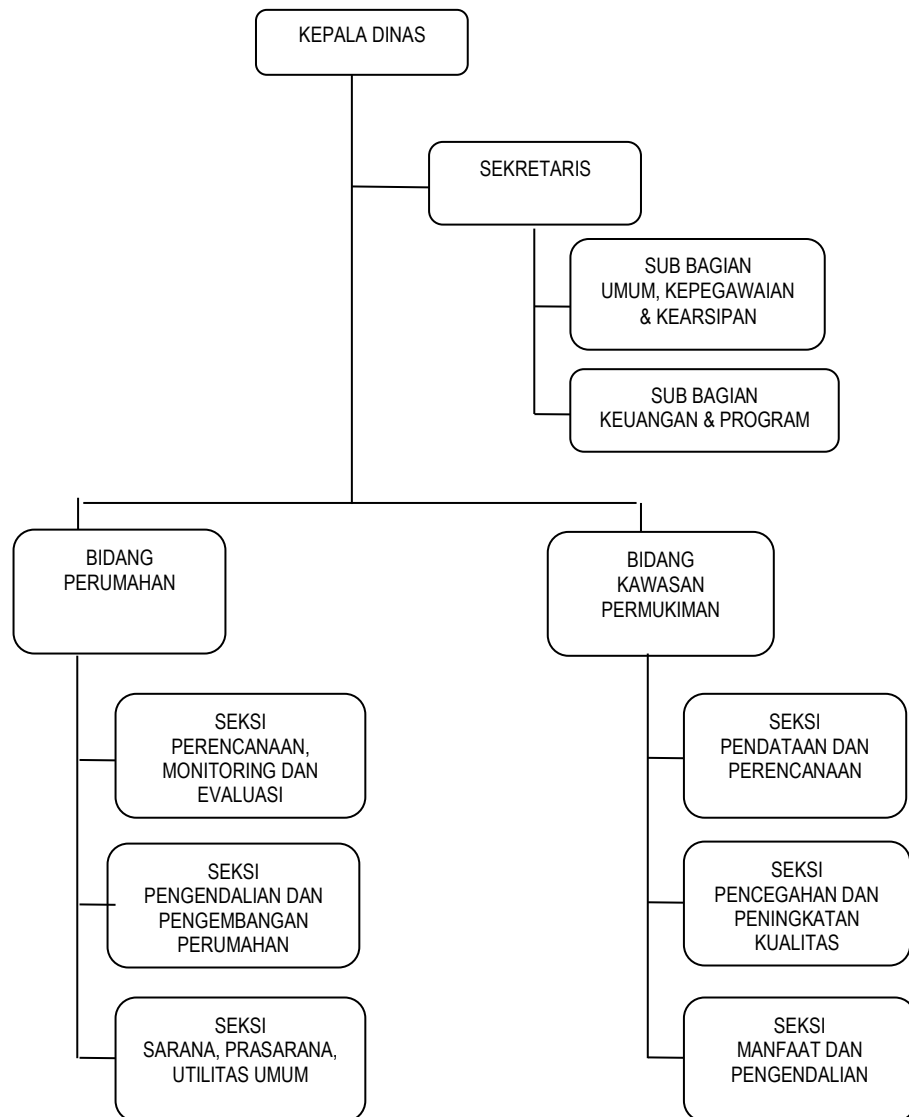
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

- ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi **Dinas Perumahan Rakyat**, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi, sebagaimana struktur organisasi berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengabdian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. Aspek-aspek Strategik

Hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar sebagai berikut:

- 1). Misi Kota Blitar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak
- 2). Perumahan dan permukiman yang layak sebagai kebutuhan utama masyarakat
- 3). Kondisi sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang membutuhkan penanganan, baik pembangunan baru maupun perbaikan

F. ISU-ISU STRATEGIS

- Terdapatnya kawasan rawah kumuh di Kota Blitar;
- Masih adanya backlog rumah/hunian;
- Terdapat rumah tidak layak huni;
- Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh
	Persentase penurunan backlog perumahan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2020 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat selama Tahun 2020 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2016-2021 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,62 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	77,2 %

1. Program

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2020

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Pengembangan Perumahan	4.086.403.300
2	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	4.001.131.140
3	Program Pelayanan Perkantoran	577.286.972
4	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	45.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.000.000
JUMLAH		8.827.446.412

2. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan program yang ditetapkan, maka melalui APBD Kota Blitar telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat pada Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2020

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	Program Pengembangan Perumahan	4.086.403.300
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan	492.149.400
	Pengendalian dan Pengembangan Perumahan	2.397.607.100
	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	296.859.500
	Operasional Pengelolaan Rusunawa	899.787.300
II	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	4.001.131.140
	Perencanaan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	143.836.500
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	958.314.640
	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	2.898.980.000
III	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN)	37.729.000
	Penyediaan / Pemeliharaan Saluran air imbah, Sanitasi dan Air Bersih	37.729.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN)	74.896.000
	Pembangunan/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata (bidang infrastruktur permukiman)	74.896.000
V	Program Pelayanan Perkantoran	577.286.972
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	89.903.450
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	90.556.222
	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	361.827.300
	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	25.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
VI	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	45.000.000
	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	35.000.000
	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	10.000.000
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.000.000
	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.000.000
JUMLAH		8.827.446.412

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target)
Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan instansi.

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,62 %	0,44 %	129,03 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	77,2 %	78,48%	101,66%
RATA-RATA CAPAIAN TARGET IKU				115,35%

Capaian Kinerja Utama selama tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Kinerja utama meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator persentase kawasan permukiman rawan kumuh tercapai 129,03% yang berasal dari perhitungan target 0,62 % dengan realisasi 0,44% pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 kawasan permukiman rawan kumuh di Kota Blitar adalah 0,44 % atau seluas 11,87 ha dari kawasan permukiman seluas 2.715,45 ha. Daerah atau kawasan permukiman rawan kumuh di Kota Blitar berada di Kelurahan Sentul, Kauman, Kepanjenkidul dan Kepanjenlor. Faktor yang mendukung pencapaian target dikarenakan adanya peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang ada di kawasan permukiman kumuh yaitu melalui pembangunan dan revitalisasi jalan dan drainase lingkungan serta upaya pencegahan munculnya permukiman kumuh melalui melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman penduduk. Selain itu adanya dukungan pemerintah pusat melalui dana kelurahan yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur permukiman khususnya

perbaikan jalan dan drainase lingkungan juga memberikan andil bagi peningkatan kualitas kawasan permukiman menjadi lebih baik dan tidak kumuh.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi upaya penurunan kawasan permukiman kumuh bukannya tidak mengalami kendala. Kendala tersebut adalah adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan infrastruktur tertunda dan mengalami refocussing. Selain itu masih adanya jalan dan drainase lingkungan yang kurang baik juga menjadi permasalahan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Peran dari masyarakat juga dirasa belum optimal dalam pencegahan kekumuhan di kota Blitar.

- b. Kinerja Utama meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dengan formula indikator jumlah rumah yang ada dibagi jumlah kebutuhan rumah x 100 % dengan realisasi 78,48 % dari target 77,2 % sehingga tercapai 101,66 %. Adapun jumlah rumah dan kebutuhan rumah di Kota Blitar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Rumah dan Kebutuhan Rumah Kota Blitar Tahun 2020

No.	LOKASI	JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH	JUMLAH RUMAH	%
1.	Kota Blitar	51558	40463	78,48

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat sudah mencapai target yang ditetapkan.

Pada akhir tahun 2020 jumlah rumah Di Kota Blitar adalah sejumlah 40.463 unit sedangkan jumlah kebutuhan rumah yang seharusnya sesuai jumlah KK adalah sejumlah 51.558 unit sehingga kebutuhan rumah yang tercukupi adalah 78,48 %. Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah sendiri. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui pengembang perumahan juga mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Dinas Perumahan Rakyat pada tahun 2020 juga melaksanakan pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sudah memiliki tanah tetapi tidak mampu membangun rumah. Meskipun target telah tercapai, akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu masih terbatasnya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dengan kata lain kurangnya penyediaan rumah layak yang terjangkau secara ekonomi bagi MBR.

Untuk itu kedepan diharapkan para pengembang perumahan bisa membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Selain itu Dinas Perumahan Rakyat juga mengajukan usulan penyediaan rumah bagi MBR melalui pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN serta usulan pembangunan Rusunawa.

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat diantaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan advice planning bagi pembangunan perumahan, rehabilitasi

rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2020

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,79 %	0,75 %	105,06 %	0,62 %	0,44 %	129,03 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	74,7 %	73,6 %	98,53%	77,2 %	78,48%	101,66%

Berdasarkan tabel di atas, capaian pada kinerja meningkatnya kualitas kawasan permukiman pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu dari realisasi 0,75 % pada tahun 2019 menjadi 0,44 % pada tahun 2020. Sedangkan pada kinerja meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat mengalami kenaikan dari 73,6 % menjadi 78,48 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat sampai dengan 2020 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2020	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,45 %	0,44 %	102,27 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	80 %	78,48%	98,1 %

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis/kinerja utama pertama yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman s.d tahun 2020 dengan realisasi 0,44 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 102,27%. Sedangkan pada kinerja meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dari target Renstra 80 % telah tercapai 98,1 %.

Pencapaian target indikator persentase kawasan permukiman kumuh sudah melebihi target akhir Renstra yakni kemajuannya sebesar 102,27%. Dalam kurun waktu 4 tahun ini Dinas Perumahan Rakyat berupaya untuk mencapai target akhir Renstra tersebut dengan melakukan penataan dan peningkatan kualitas di kawasan permukiman rawan kumuh yang belum tertangani. Untuk mendukung pencapaian target, Dinas Perumahan Rakyat juga berkolaborasi dengan Program KOTAKU yang bersumber dana APBN.

Selain menangani kawasan yang terindikasi rawan kumuh, Dinas Perumahan Rakyat juga melakukan pencegahan terhadap munculnya permukiman kumuh baru dengan

melaksanakan peningkatan jalan dan drainase lingkungan di Kelurahan se Kota Blitar.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2020 tingkat pencapaian kinerja urusan perumahan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi SPM Tahun 2020

Indikator	Nilai Tahun Target Pencapaian	Perhitungan	Angka	Capaian Kinerja 2020
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 %	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n _____ x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	12/12 x 100%	100 %
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100 %	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni _____ x 100% Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	3/3 x 100%	100 %

Pada tahun 2020 capaian kinerja SPM untuk indikator jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana terealisasi 100%. Jumlah kejadian rumah korban bencana pada tahun 2020 adalah 12 unit dan yang telah ditangani melalui rehab rumah oleh Dinas Perumahan Rakyat sejumlah 12 unit rumah atau tertangani 100 %. Sedangkan untuk fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah terealisasi 100% yaitu dari 3 rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah, telah terfasilitasi 3 rumah berupa pembangunan baru (2 unit) dan bantuan uang sewa (1 unit rumah).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dengan target nasional, propinsi dan instansi sejenis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional dan Propinsi

RPJMN 2020-2024		RPJMD Propinsi Jawa Timur (2019-2024)		Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar		
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1221 ha	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	81,64 %	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,62 %	0,44 %
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	82,35%	Jumlah backlog kepemilikan rumah	1.353.000	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	77,2 %	78,48%

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 dengan Instansi Sejenis

Indikator Kinerja			Realisasi 2019			Realisasi 2020		
Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Penurunan kawasan Kumuh	0,75 %	89,57 %	54,55%	0,44 %	63,47%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Cakupan ketersediaan rumah layak hun	Pertumbuhan Kapasitas Rumah Umum	73,6 %	95,15	46,19%	78,48%	96,28	64,59%

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasara Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi per Sasaran Pembangunan

SASARAN		ANGGARAN	
URAIAN	INDIKATOR	Rp.	%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	4.124.132.300	50,23
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	4.086.403.300	49,77
JUMLAH		8.210.535.600	100

Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.210.535.600 merupakan alokasi anggaran untuk sasaran pembangunan. Selain alokasi dana tersebut, juga didukung oleh dana administrasi umum sebesar Rp. 627.286.972

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2020 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

KINERJA UTAMA / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman / Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,62 %	0,44 %	129,03	4.076.027.140	3.728.624.981	91,48
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	45,2 %	72,68%	160,80	4.001.131.140	3.659.781.401	91,47
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN)	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	45,2 %	72,68%	160,80	74.896.000	68.843.580	91,92
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat / Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	77,2 %	78,48%	101,66	4.713.690.272	4.627.452.490,15	98,17
Program Pengembangan perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	66,15 %	80,17%	121,19	4.086.403.300	3.973.665.518	97,24
	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	85%	82,61%	97,19			
	Persentase tingkat Hunian Rusunawa	100%	100%	100			
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Infrastruktur Perumahan)	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	85%	82,61%	97,19	37.729.000	35.202.600,0	93,3
Program Pelayanan	Persentase kecukupan	100 %	100 %	100	577.286.972	569.255.172,15	98,61

KINERJA UTAMA / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Perkantoran	pelayanan perkantoran						
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	100 %	100 %	100	45.000.000	44.329.200	98,51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	100 %	100	5.000.000	5.000.000	100

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	129,03 %	91,48	1,41
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	101,66%	98,17	1,04

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

- i. Sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase kawasan permukiman rawan kumuh tingkat efisiensinya sebesar 1,41, bahwa dengan capaian kinerja 129,03% membutuhkan anggaran sebesar 91,48 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Infrastruktur Permukiman)
- ii. Sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat tingkat efisiensinya sebesar 1,04, bahwa dengan capaian kinerja 101,66 % membutuhkan anggaran sebesar 98,17 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Perumahan dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Infrastruktur Perumahan) .

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I	Program Pengembangan Perumahan	4.124.132.300	3.973.665.518	97,24
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan	492.149.400	467.021.300	94,89
	Pengendalian dan Pengembangan Perumahan	2.397.607.100	2.333.044.750	97,31
	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	296.859.500	289.624.400	97,56
	Operasional Pengelolaan Rusunawa	899.787.300	883.975.068	98,34
II	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	4.001.131.140	3.659.781.401	91,47
	Perencanaan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	143.836.500	125.046.800	86,94

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	958.314.640	875.456.740	91,35
	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	2.898.980.000	2.659.277.861	91,73
III	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN)	37.729.000	35.202.600	93,30
	Penyediaan / Pemeliharaan Saluran air imbah, Sanitasi dan Air Bersih	37.729.000	35.202.600	93,30
IV	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN)	74.896.000	68.843.580	91,92
	Pembangunan/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata (bidang infrastruktur permukiman)	74.896.000	448.304.849	95,83
V	Program Pelayanan Perkantoran	577.286.972	569.255.172,15	98,61
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	89.903.450	89.735.550	99,81
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	90.556.222	87.909.382	97,08
	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	361.827.300	356.844.440,15	98,62
	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.879.800	99,52
	Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000	9.886.000	98,86
VI	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	45.000.000	44.329.200	98,51
	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	35.000.000	35.000.000	100
	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	10.000.000	9.329.200	93,29
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.000.000	5.000.000	100
	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
	JUMLAH	8.827.446.412	8.356.077.471,15	94,66

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2020 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah predikat nilai A (Sangat Baik) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan pada sasaran 1 Dinas Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan permukiman rawan kumuh dari target 0,62% telah terealisasi 0,44% pada tahun 2020 atau tercapai 129,03%. Sedangkan pada sasaran 2 yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dari target 78,48 % telah terealisasi 78,48 % atau tercapai 101.66 %.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2020 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar diantaranya :

1. Masih terdapatnya infrastruktur permukiman yang kondisinya kurang baik sehingga rawan menimbulkan permukiman kumuh terutama di kawasan padat penduduk.
2. Adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik konstruksi di perumahan dan kawasan ditunda pelaksanaannya
3. Belum optimalnya peran masyarakat untuk memelihara dan menjaga permukiman agar tidak kumuh
4. Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

B. Langkah Perbaikan

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infratraktur permukiman terutama jalan dan drainase lingkungan serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta
2. Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan fisik konstruksi di perumahan dan kawasan permukiiman yang tertunda/terkena refocussing pada penganggaran tahun berikutnya
3. Adanya sosialisasi peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
4. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199803 2 004

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021**

VISI : MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021
MISI : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERBASIS PADA SISTEM PELAYANAN BERKUALITAS DAN PARTISIPATIF

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik/luas kawasan permukiman x 100 %	-	-	84	85	86	87	88	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Luas kawasan permukiman rawan kumuh / Luas kawasan permukiman x 100 %	-	-	1,1	0,95	0,79	0,62	0,45	Pemenuhan penyediaan perumahan / hunian layak	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
	Persentase penurunan backlog perumahan	(Jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK- jumlah rumah yang ada) Tahun N0 - Jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK- jumlah rumah yang ada) Tahun N /Jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK- jumlah rumah yang ada) Tahun N0	-	-	2	4	6	8	10	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Jumlah rumah yang ada / Jumlah kebutuhan rumah x 100 %	-	-	69,7	72,2	74,7	77,2	80,0	Pemenuhan penyediaan perumahan/hunian layak	Program Pengembangan Perumahan	

Blitar, 31 Januari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
INSTANSI/UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PRGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	0,62 %	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	45,2 %	Perencanaan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen & data base permukiman yang tersusun	2 dokumen	143.836.500
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan kawasan permukiman	3 laporan	
							Jumlah pendampingan program nasional	0	
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	3 laporan	
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani	34.900 m2	958.314.640
							Luas kawasan prioritas yang ditata	25.000 m2	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PRGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Panjang jalan, drainase permukiman yang terbangun dan terpelihara	5.402 m	2.898.980
							Jumlah sarana penunjang permukiman yg terbangun dan terpelihara	4 unit	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Infrastruktur Permukiman)	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	45,2 %	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembata, Pasar dan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata (bidang infrastruktur permukiman)	Luas lawasan pendukung wisata yang ditata	200 m2	74.896.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresenta pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	77,2 %	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	66,15 %	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan	Jumlah dokumen & data base perumahan yang tersusun	2 dokumen	492.149.400
				Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	85 %		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 laporan	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PRGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase tingkat hunian Rusunawa	100 %		Jumlah laporan koordinasi perumahan	10 laporan	
						Pengendalian dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab dan di fasilitasi	191 unit	2.397.607.100
							Jumlah rumah korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi	14 unit	
							Jumlah peserta sosialisasi pengembangan perumahan	280 orang	
						Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Panjang jalan, drainase perumahan yang terbangun dan terpelihara	460 m	295.859.500
							Jumlah sarana penunjang perumahan yang dibangun & dipelihara	0	
						Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan rusunawa	475 orang	899.787.300

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PRGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia	26 jenis	
							Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	
							Jumlah sarana dan prasarana rusunawa yang terpelihara	13 unit	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Infrastruktur Perumahan)	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	85 %	Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih	Panjang drainase perumahan terbangun	0	37.729.000

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KOTA BLITAR


Ir. ERNA SANTI, MT
NIP. 19670516 199803 2 004

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Tahun : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Luas kawasan permukiman rawan kumuh / Luas kawasan permukiman x 100 %	0,62%	0,44%	129,03%	Sudah Tercapai	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	4.001.131.140	3.659.781.401	91,47	
								PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN)	74.896.000	68.843.580	91,92	
								PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	577.286.972	569.255.172,15	98,61	
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	45.000.000	44.329.200	98,51	
								PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.000.000	5.000.000	100	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Jumlah rumah yang ada / Jumlah kebutuhan rumah x 100 %	77,2%	78,48%	101,66%	Sudah Tercapai	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.086.403.300	3.973.665.518	97,24	
								PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN)	37.729.000	35.202.600,00	93,3	

Blitar, 31 Januari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199803 2 004